

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan kewenangan Menteri di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dipandang perlu untuk menyelenggarakan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2012 telah menetapkan sasaran, indikator kinerja, lingkup keluaran, dan alokasi pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010/2014;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup yang Dapat Didekonsentrasikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
2. Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut sebagai Dekonsentrasi Bidang LH, adalah pelimpahan wewenang pengelolaan lingkungan hidup dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi.
4. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Renja KLH adalah dokumen perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKA-KL KLH, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup yang merupakan penjabaran dari RKP dan Renja KLH dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Laporan manajerial dekonsentrasi bidang lingkungan hidup adalah laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup yang memuat laporan perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
8. Laporan akuntabilitas dekonsentrasi bidang lingkungan hidup adalah laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup yang mencakup laporan keuangan dan laporan barang.
9. Laporan teknis kegiatan adalah laporan yang memuat kumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, hasil analisis terhadap data dan informasi, serta intisari dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan dan disusun sesuai format yang telah ditentukan.

10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi.
13. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi, dan SKPD dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Dekonsentrasi Bidang LH; dan
- b. membantu pelaksanaan kewenangan Menteri di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Arah kebijakan pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH meliputi:

- a. pencapaian sasaran prioritas nasional tentang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana yang mencakup:
 1. penurunan beban pencemaran lingkungan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan;
 2. penekanan laju kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak, baik di kawasan hutan, laut, pesisir, maupun di areal bekas pertambangan, serta pengelolaan keanekaragaman hayati; dan

3. penguatan kelembagaan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup, sebagaimana ditetapkan dalam RKP;
- b. peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah secara berkelanjutan;
- c. dukungan terhadap gubernur dalam menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tingkat provinsi; dan
- d. pelaksanaan kegiatan yang bersifat non-fisik yaitu kegiatan perencanaan, pemrograman, pembinaan, pengawasan, dan kegiatan lainnya yang bersifat non-fisik.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Anggaran pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari anggaran kegiatan prioritas nasional program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada pada Kementerian Lingkungan Hidup.
- (3) Pemanfaatan anggaran Dekonsentrasi Bidang LH dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 6

- (1) Dekonsentrasi Bidang LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Dekonsentrasi Bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub bidang pengendalian dampak lingkungan yang terdiri atas:
 1. sub-sub bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 2. sub-sub bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 3. sub-sub bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 4. sub-sub bidang pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara;
 5. sub-sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
 6. sub-sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa;

7. sub-sub bidang pengembangan perangkat ekonomi lingkungan;
 8. sub-sub bidang pendidikan dan pelatihan;
 9. sub-sub bidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan hidup;
 10. sub-sub bidang penegakan hukum lingkungan;
 11. sub-sub bidang perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan; dan
 12. sub-sub bidang perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;
- b. sub bidang konservasi sumber daya alam dengan sub-sub bidang keanekaragaman hayati.
- (3) Lingkup pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Untuk melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi Bidang LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, gubernur menetapkan SKPD di bidang lingkungan hidup provinsi sebagai satuan kerja pelaksana.

Pasal 8

Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH didasarkan pada:

- a. renja KLH;
- b. hasil musyawarah perencanaan pembangunan nasional; dan
- c. petunjuk teknis penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang LH Tahun 2012.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Dekonsentrasi Bidang LH meliputi:
 - a. penetapan target;
 - b. penetapan indikator kinerja; dan
 - c. penetapan alokasi anggaran.
- (2) Penetapan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. penurunan beban pencemaran sebesar 20% (duapuluh persen);
 - b. penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup daerah aliran sungai prioritas, hutan dan lahan serta keaneka ragaman hayati; dan
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Penetapan indikator kinerja dan penetapan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan Lampiran II

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), SKPD harus menyelenggarakan administrasi kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menetapkan:
 - a. kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar; dan
 - d. bendahara pengeluaran.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Bidang LH, kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menetapkan tim pelaksana kegiatan Dekonsentrasi Bidang LH.
- (4) Pelaksanaan administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penetapan, persyaratan, dan tugas tim pelaksana kegiatan Dekonsentrasi Bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Penganggaran Dekonsentrasi Bidang LH dilaksanakan sesuai dengan indikator dan alokasi anggaran yang dituangkan dalam RKA-KL Dekonsentrasi Bidang LH.
- (2) RKA-KL Dekonsentrasi Bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari RKA-KL KLH.
- (3) Anggaran Dekonsentrasi Bidang LH dilarang untuk membiayai kegiatan:
 - a. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - b. pembangunan fisik kantor dan fasilitasnya;
 - c. pengadaan kendaraan dinas;
 - d. pembangunan prasarana lingkungan hidup;
 - e. pembangunan fasilitas publik untuk lingkungan hidup;
 - f. pengadaan peralatan selain pendukung operasional kegiatan;
 - g. pengadaan peralatan selain contoh demo atau model; dan
 - h. hal lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya disediakan dari APBD.

Pasal 12

- (1) Kuasa pengguna anggaran menyusun laporan pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH yang terdiri atas:
 - a. laporan manajerial;
 - b. laporan akuntabilitas; dan
 - c. laporan teknis kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disusun sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Laporan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. disusun berdasarkan pedoman yang tercantum dalam petunjuk teknis kegiatan dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. disampaikan melalui mekanisme pelaporan elektronik (*e-reporting*).
- (4) Dalam hal petunjuk teknis kegiatan yang dilaksanakan tidak tercantum dalam Lampiran IV, laporan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan petunjuk teknis kegiatan yang ditetapkan oleh eselon I kegiatan terkait.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. setiap 3 (tiga) bulan, untuk laporan manajerial dan akuntabilitas; dan
 - b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk laporan kegiatan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang LH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar;
 - b. rapat kerja teknis;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. unit eselon I Kementerian Lingkungan Hidup melalui unit eselon II terkait; dan
 - b. Pusat Pengelolaan Ekoregion.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengaturan dan pembinaan teknis kepada SKPD; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap capaian SKPD:

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa koordinasi dan fasilitasi kepada SKPD dalam:
 - a. penyelenggaraan kerjasama antar daerah;
 - b. pencapaian target dan indikator kinerja.
- (6) Pelaksanaan kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diselenggarakan:
 - a. sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas akuntabilitas pelaporan keuangan setiap SKPD; dan
 - b. sesuai dengan metoda dan standar pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Pusat maupun vertikal di provinsi.
- (2) Inspektorat dapat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Daerah dan/atau Inspektorat Provinsi secara selektif berdasarkan tingkat urgensinya melalui mekanisme kesepakatan penugasan Menteri kepada gubernur.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap laporan manajerial dan akuntabilitas pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH.

Pasal 15

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 menunjukkan bahwa pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang LH tidak dilaksanakan sesuai kegiatan yang dilimpahkan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat:

- a. merekomendasikan blokir anggaran terhadap Pemerintah Provinsi yang bersangkutan kepada Kementerian Keuangan; dan/atau
- b. menarik kembali urusan Pemerintah di bidang lingkungan hidup yang telah didekonsentrasikan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 November 2011

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Inar Ichsana Ishak

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2011
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 TAHUN 2012

**LINGKUP URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 YANG DIDEKONSENTRASIKAN TAHUN 2012
 BERDASARKAN PENGELOMPOKKAN KELUARAN**

Kegiatan dekonsentrasi lingkungan hidup tahun 2012 diatur dalam nomenklatur perencanaan berikut:

- a. Nama Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- b. Kode Program : 043
- c. Nama Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah
- d. Kode Kegiatan : 2722
- e. Keluaran : (01) Pengendalian pencemaran lingkungan
 (02) Pengendalian kerusakan lingkungan
 (03) Peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

MENURUT PP 38/2007			MENURUT KELOMPOK KELUARAN	
No.	Sub sub Bidang	Urusan	Payung Keluaran (Output)	Sub Keluaran (Sub Output)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3	Pengendalian pencemaran lingkungan	a Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER

MENURUT PP 38/2007			MENURUT KELOMPOK KELUARAN		
No.	Sub sub Bidang	Urusan	Payung Keluaran (Output)	Sub Keluaran (Sub Output)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)	Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL yang menjadi urusan wajib Pemerintah	Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	b	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di Kabupaten/Kota
			Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	c	Pembinaan dan pengawasan terhadap pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL kewenangan Pemerintah
3	Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air	Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air skala nasional dan/atau merupakan lintas batas negara Pengawasan pengendalian pencemaran air skala nasional	Pengendalian pencemaran lingkungan	d	Pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara
			Pengendalian pencemaran lingkungan	e	Pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional
			Pengendalian kerusakan lingkungan	f	Pengkajian teknis penetapan kelas air dan rencana umum pemulihan kualitas lingkungan sungai
4	Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara	Pengaturan pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara skala nasional	Pengendalian pencemaran lingkungan	g	Pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional
5	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan	Pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala nasional	Pengendalian kerusakan lingkungan	h	Pelaksanaan Menuju Indonesia Hijau (MIH) pada wilayah rawan kebakaran
			Pengendalian kerusakan lingkungan	i	Pengendalian kerusakan wilayah rawan kebakaran
6	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi	Pengawasan atas pelaksanaan pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala	Pengendalian kerusakan lingkungan	j	Pelaksanaan Menuju Indonesia Hijau (MIH) pada wilayah ekosistem sensitif prioritas nasional

MENURUT PP 38/2007			MENURUT KELOMPOK KELUARAN	
No.	Sub sub Bidang	Urusan	Payung Keluaran (Output)	Sub Keluaran (Sub Output)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	biomassa	nasional	Pengendalian kerusakan lingkungan	k Pengendalian kerusakan ekosistem sensitif prioritas nasional
7	Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	l Pembinaan penyusunan PDRB Hijau
8	Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan	Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	m Pemantauan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH
			Pengendalian pencemaran lingkungan	n Pembinaan pelaksanaan dan pengawasan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
			Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	o Pembinaan pengawasan pelaksanaan Adiwiyata
			Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	p Pembinaan pengawasan inventarisasi pendataan masyarakat hukum adat yang menerapkan kearifan lingkungan
			Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	q Pembinaan pengawasan pelaksanaan kampanye program nasional
9	Penegakan hukum lingkungan	Penegakan hukum lingkungan	Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	r Inventarisasi dan klarifikasi sengketa LH yang berpotensi atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau LH sebagai hak milik publik/negara
			Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	s Inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus LH (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)
			Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	t Inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun materil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH

MENURUT PP 38/2007			MENURUT KELOMPOK KELUARAN	
No.	Sub sub Bidang	Urusan	Payung Keluaran (Output)	Sub Keluaran (Sub Output)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan	Pelaksanaan komitmen perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pengesahan, pemantauan penataan, serta dokumentasi dan diseminasi	Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	u Sosialisasi dan pemantauan penataan terhadap 12 konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia
11	Perubahan iklim dan perlindungan atmosfer	Penetapan kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim	Pengendalian kerusakan lingkungan	v Inventarisasi data upaya lokal dalam mengantisipasi perubahan iklim
			Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	w Pembinaan pelaksanaan inventarisasi data untuk kajian resiko dan perubahan iklim (data kerentanan)
		Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan deposisi asam serta pemantauannya	Peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH	x Pembinaan inventarisasi data gas rumah kaca (GRK)
12	Keanekaragaman hayati	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala nasional	Pengendalian kerusakan lingkungan	y Inventarisasi data keanekaragaman hayati strategis nasional
			Pengendalian kerusakan lingkungan	z Peningkatan kualitas Taman Kehati strategis

KETERANGAN:

Kolom (5) yang berjudul Sub Keluaran (Sub Output) adalah rincian tahapan/bagian dari urusan yang berada di kolom (3) yang dilimpahkan kepada Gubernur. Tahapan/bagian lain yang harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan urusan di kolom (3) yang tidak tercantum dalam kolom (5) masih dilaksanakan oleh Menteri.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Inar Ichsana Ishak

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2011
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 TAHUN 2012

**ALOKASI ANGGARAN DAN INDIKATOR KINERJA
 DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012**

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
1	NAD (Nanggroe Aceh Darussalam)		7.000.000.000
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <p>1 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <p>2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <hr/> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p>1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI</p> <p>2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI</p> <p>3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>4 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p> <p>5 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>6 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		7 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM	
		8 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD <hr/> C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH : 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 3 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 4 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
2	Sumatera Utara		6.400.000.000
		A Pengendalian Pencemaran Lingkungan : 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara 3 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional 4 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 5 Laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p>1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI</p> <p>2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI</p>	
		<p>3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>4 Laporan kegiatan penyelamatan danau</p> <p>5 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p> <p>6 Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p> <p>7 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim</p> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan pembinaan penyusunan PDRB Hijau</p> <p>3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)</p> <p>4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>5 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA</p> <p>6 Laporan pembinaan dan revitalisasi peran penerima anugerah Kalpataru</p> <p>7 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		8 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
3	Sumatera Barat		6.400.000.000
		A Pengendalian Pencemaran Lingkungan : 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER	
		2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara 3 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional 4 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional <hr/> B Pengendalian Kerusakan Lingkungan : 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 4 Laporan kegiatan penyelamatan danau 5 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 6 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca 7 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim 8 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM 9 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara</p> <p>3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p>	
		<p>4 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA</p> <p>5 Laporan pembinaan dan pengawasan inventarisasi data masyarakat hukum adat yang melaksanakan kearifan lingkungan</p> <p>6 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p> <p>7 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH</p>	
4	Riau		7.000.000.000
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p> <p>2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>3 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <hr/> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p>1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI</p> <p>2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI</p> <p>3 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p> <p>4 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>5 Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p> <p>6 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim</p> <p>7 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM</p>	

		<p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara</p> <p>3 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA</p> <p>4 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p> <p>5 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH</p>	
--	--	--	--

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
5	Kepulauan Riau		6.400.000.000
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p> <p>2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <p>3 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional</p> <p>4 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <hr/> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p>1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI</p> <p>2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI</p> <p>3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>4 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p>	
		<p>5 Laporan kegiatan penyelamatan danau</p> <p>6 Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p> <p>7 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>8 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim</p> <p>9 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM</p> <p>10 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)</p> <p>3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara</p> <p>4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>5 Laporan sosialisasi dan pemantauan penataan terhadap 12 konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia</p> <p>6 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p> <p>7 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH</p>	
6	Kepulauan Bangka Belitung		5.400.000.000
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p>	
		<p>2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <p>3 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p>	
		<p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 4 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/ telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/ atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara 3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup 4 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA 5 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 6 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH 	
7	Jambi		6.400.000.000
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <hr/> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p>1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI</p> <p>2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI</p> <p>3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>4 Laporan kegiatan penyelamatan danau</p> <p>5 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p> <p>6 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>7 Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p> <hr/> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan Pembinaan penyusunan PDRB Hijau</p> <p>3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)</p> <p>4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara</p>	
		<p>5 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>6 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kampanye program nasional (Isu Kebakaran Hutan)</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		7 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 8 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
8	Sumatera Selatan		6.400.000.000
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional 3 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 4 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara	
		<p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 4 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 5 Laporan kegiatan penyelamatan danau 6 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca 7 Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 8 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		9 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM 10 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD <hr/> C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH : 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu) 3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/ telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/ atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/ negara 4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup 5 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA 6 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kampanye program nasional (Isu DAS) 7 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 8 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
9	Bengkulu		6.400.000.000
		A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara 	
		<p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 4 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 5 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca 6 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim 7 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM 8 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu) 	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara</p> <p>4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>5 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p> <p>6 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH</p>	
10	Lampung	<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p> <p>2 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional</p> <p>3 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>4 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <hr/> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p>1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI</p> <p>2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI</p> <p>3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p>	6.400.000.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		4 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 5 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca <hr/> C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH : 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu) 3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara 4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 5 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA	
		6 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 7 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
11	Banten		6.000.000.000
		A Pengendalian Pencemaran Lingkungan : 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional 3 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>4 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <p>5 Laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R</p> <hr/> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p>1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>2 Laporan kegiatan penyelamatan danau</p> <p>3 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p> <hr/> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA</p> <p>3 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p> <p>4 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH</p>	
12	Jawa Barat		6.850.000.000
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p> <p>2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p>1 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI</p> <p>2 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>3 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p> <p>4 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>5 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim</p> <p>6 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM</p> <p>7 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD</p> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan pembinaan penyusunan PDRB Hijau</p>	
		<p>3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara</p> <p>4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>5 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		6 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 7 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
13	Jawa Tengah		6.000.000.000
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional 3 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 4 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara 5 Laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R <hr/> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 4 Laporan kegiatan penyelamatan danau <hr/> 5 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 6 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>7 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim</p> <p>8 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM</p> <p>9 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD</p> <hr/> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan pembinaan penyusunan PDRB Hijau</p> <p>3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)</p> <p>4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara</p> <p>5 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>6 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA</p> <p>7 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p> <p>8 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
14	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional 3 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 4 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara <hr/> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 4 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 5 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca 6 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim 7 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM 8 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD <hr/> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 	5.720.000.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		2 Laporan pembinaan penyusunan PDRB Hijau	
		3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu) 4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara 5 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 6 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA 7 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 8 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
15	Jawa Timur		6.000.000.000
		A Pengendalian Pencemaran Lingkungan : 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional 3 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 4 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara 5 Laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p>1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI</p> <p>3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p>	
		<p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan pembinaan penyusunan PDRB Hijau</p> <p>3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>4 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA</p> <p>5 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kampanye program nasional (Isu DAS)</p> <p>6 Laporan pembinaan dan revitalisasi peran penerima anugerah Kalpataru</p> <p>7 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p> <p>8 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH</p>	
16	Bali		6.050.000.000
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		2 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional 3 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 4 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara 5 Laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R	

		<p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 4 Laporan kegiatan penyelamatan danau 5 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 6 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca 7 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim 8 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM 9 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD	
		<p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu) 3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara 4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 5 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA 6 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 7 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
17	NusaTenggara Barat	A Pengendalian Pencemaran Lingkungan : 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara <hr/> B Pengendalian Kerusakan Lingkungan : 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau	6.600.000.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>4 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p> <p>5 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <hr/> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)</p> <p>3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/ telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/ atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/ negara</p> <p>4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup</p>	
		<p>5 Laporan pembinaan dan pengawasan inventarisasi data masyarakat hukum adat yang melaksanakan kearifan lingkungan</p> <p>6 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA</p> <p>7 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p> <p>8 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH</p>	
18	Nusa Tenggara Timur		7.000.000.000
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <p>1 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <hr/> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p>1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI</p> <p>2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI</p> <p>3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>4 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>5 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim</p> <p>6 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM</p> <hr/> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p>	
		<p>2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara</p> <p>3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>4 Laporan sosialisasi dan pemantauan penataan terhadap 12 konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia</p> <p>5 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA</p> <p>6 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p> <p>7 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH</p>	
19	Kalimantan Selatan		6.500.000.000

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p> <p>2 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional</p> <p>3 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>4 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <hr/> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p>1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI</p> <p>2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI</p> <p>3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p>	
		<p>4 Laporan kegiatan penyelamatan danau</p> <p>5 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p> <p>6 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>7 Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p> <p>8 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim</p> <p>9 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM</p> <hr/> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/ telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/ atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/ negara 3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup 4 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kampanye program nasional (Isu DAS) 5 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA 6 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 7 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH 	
20	Kalimantan Barat		6.400.000.000
		A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :	

		<ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/ atau lintas batas negara 	
		B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 4 Laporan kegiatan penyelamatan danau 5 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 6 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca 7 Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 8 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim 9 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM 10 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu) 3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/ telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara 	
		<ol style="list-style-type: none"> 4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 5 Laporan sosialisasi dan pemantauan penataan terhadap 12 konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia 	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		6 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA 7 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kampanye program nasional (Isu Kebakaran Hutan) 8 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 9 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
21	Kalimantan Timur		6.400.000.000
		A Pengendalian Pencemaran Lingkungan : 1 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional 2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara 4 Laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R B Pengendalian Kerusakan Lingkungan : 1 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 2 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 3 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca 4 Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 5 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim 6 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)</p> <p>3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara</p> <p>4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>5 Laporan sosialisasi dan pemantauan penataan terhadap 12 konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia</p> <p>6 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA</p> <p>7 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p> <p>8 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH</p>	
22	Kalimantan Tengah		7.000.000.000
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <p>1 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <hr/> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p>1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau	
		4 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca 5 Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 6 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH : 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan pembinaan penyusunan PDRB Hijau 3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/ telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/ atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara 4 Laporan pembinaan dan pengawasan inventarisasi data masyarakat hukum adat yang melaksanakan kearifan lingkungan 5 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kampanye program nasional (Isu Kebakaran Hutan) 6 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 7 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
23	Sulawesi Utara		6.300.000.000
		A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 3 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional 4 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara	
		5 Laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R <hr/> B Pengendalian Kerusakan Lingkungan : 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 4 Laporan kegiatan penyelamatan danau 5 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 6 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca 7 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim 8 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM 9 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD <hr/> C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu) 3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/ telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/ atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/ negara 4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup 5 Laporan sosialisasi dan pemantauan penataan terhadap 12 konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia 6 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA 	
		<ol style="list-style-type: none"> 7 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 8 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH 	
24	Gorontalo		3.500.000.000
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/ atau lintas batas negara 3 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional 	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>4 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>5 Laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R</p> <hr/> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p>1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI</p> <p>2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI</p> <p>3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>4 Laporan kegiatan penyelamatan danau</p> <p>5 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p> <p>6 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>7 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim</p>	

		<p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)</p> <p>3 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA</p> <p>4 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kampanye program nasional (Isu Kebakaran Hutan)</p>	
--	--	---	--

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		5 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 6 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
25	Sulawesi Tengah		7.000.000.000
		A Pengendalian Pencemaran Lingkungan : 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER 2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara B Pengendalian Kerusakan Lingkungan : 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 4 Laporan kegiatan penyelamatan danau 5 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 6 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca 7 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim	
		8 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM 9 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)</p> <p>3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>4 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p> <p>5 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH</p>	
26	Sulawesi Selatan		7.000.000.000
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p> <p>2 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional</p> <p>3 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>4 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <hr/> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p>1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI</p> <p>2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau</p> <p>4 Laporan kegiatan penyelamatan danau</p> <p>5 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut</p> <p>6 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca</p> <p>7 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim</p> <p>8 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD</p> <hr/> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)</p> <p>3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara</p> <p>4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>5 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA</p> <p>6 Laporan pembinaan dan pengawasan inventarisasi data masyarakat hukum adat yang melaksanakan kearifan lingkungan</p> <p>7 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
27	Sulawesi Tenggara		7.000.000.000
		A Pengendalian Pencemaran Lingkungan : 1 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional	
		2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara B Pengendalian Kerusakan Lingkungan : 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 4 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 5 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca 6 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim 7 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM 8 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH : 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan pembinaan penyusunan PDRB Hijau 3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		4 Laporan pembinaan dan pengawasan inventarisasi data masyarakat hukum adat yang melaksanakan kearifan lingkungan 5 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kampanye program nasional (Isu DAS) 6 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 7 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
28	Sulawesi Barat		7.000.000.000
		A Pengendalian Pencemaran Lingkungan : 1 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara 3 Laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R <hr/> B Pengendalian Kerusakan Lingkungan : 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI (peningkatan kualitas taman KEHATI) 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 4 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 5 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca 6 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim 7 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>8 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD</p> <hr/> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>3 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA</p> <p>4 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah</p>	
		<p>5 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH</p>	
29	Maluku		4.500.000.000
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <p>1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER</p> <p>2 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional</p> <p>3 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara</p> <hr/> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <p>1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI</p> <p>2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI</p>	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 4 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 5 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM <hr/> C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH : 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu) 3 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA 4 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 5 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
30	Maluku Utara		2.980.000.000
		A Pengendalian Pencemaran Lingkungan : 1 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara <hr/> B Pengendalian Kerusakan Lingkungan : 1 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 2 Laporan kegiatan penyelamatan danau 3 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		4 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH : 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	
31	Papua		7.000.000.000
		A Pengendalian Pencemaran Lingkungan : 1 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara <hr/> B Pengendalian Kerusakan Lingkungan : 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau	- -
		4 Laporan kegiatan penyelamatan danau 5 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca 6 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim 7 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD <hr/> C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :	-

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen) 2 Laporan pembinaan penyusunan PDRB Hijau 3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 4 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA 5 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah 6 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH 	
32	Papua Barat		7.000.000.000
		<p>A Pengendalian Pencemaran Lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional 2 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara 3 Laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R <hr style="border-top: 1px dotted black;"/> <p>B Pengendalian Kerusakan Lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI 	
		<ol style="list-style-type: none"> 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau 4 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut 5 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca 	

No	Provinsi	Indikator Kinerja/Sub Keluaran	Alokasi Anggaran (Rp)
		<p>6 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim</p> <hr/> <p>C Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH :</p> <p>1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)</p> <p>2 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara</p> <p>3 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA</p> <p>4 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH</p>	
TOTAL			200.000.000.000

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

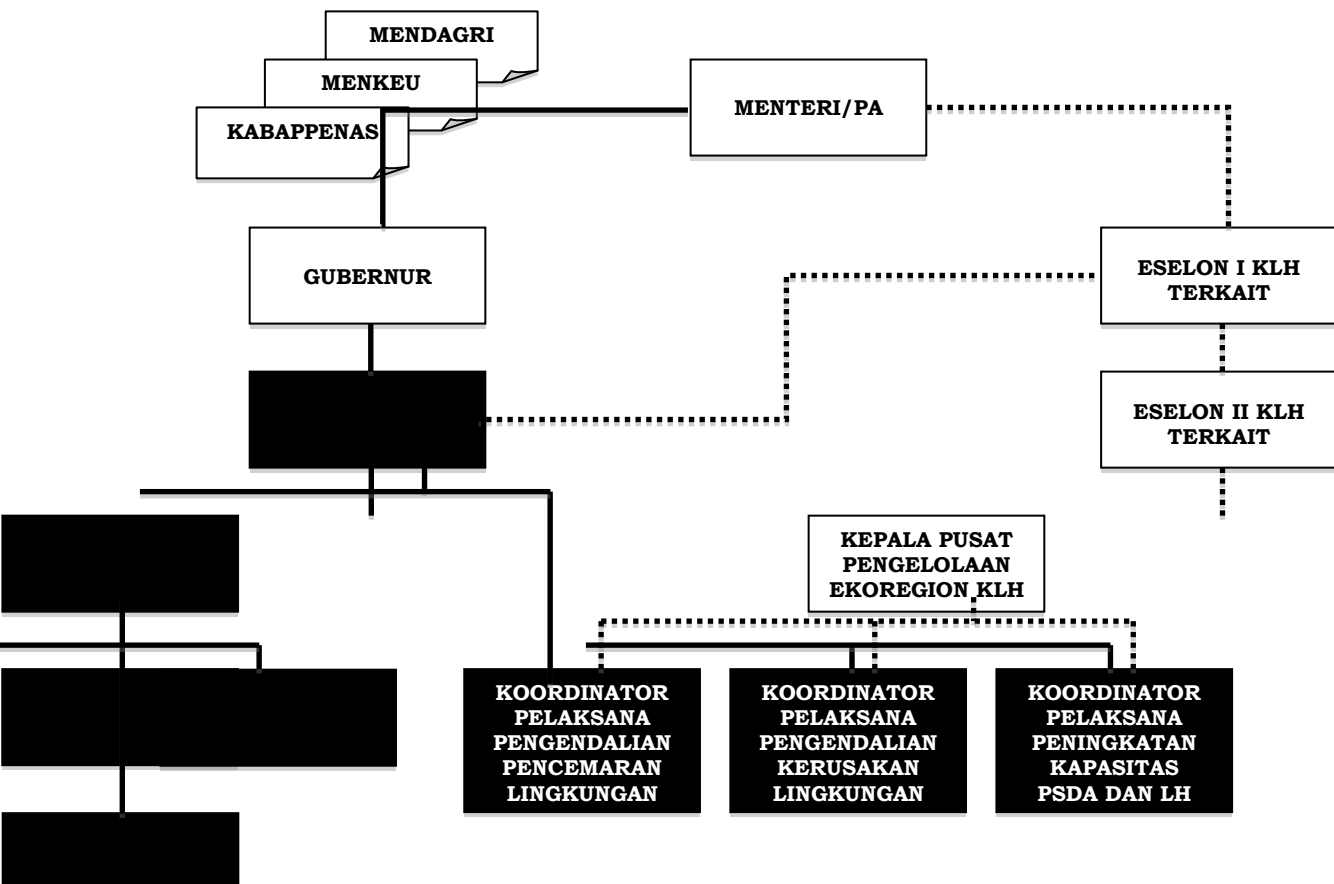
BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2011
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN
 HIDUP TAHUN 2012

PENGGORGANISASIAN DAN ADMINISTRASI KEGIATAN

A. STRUKTUR PENGGORGANISASIAN PELAKSANAAN KEGIATAN



Keterangan :

Garis pertanggungjawaban langsung dan merupakan alur pelaporan manajerial dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008

..... Garis koordinasi konsultatif dan merupakan alur pelaporan teknis kegiatan

■ Ditetapkan oleh Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan

■ Ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala SKPD Lingkungan Hidup

Struktur organisasi diatas dibentuk berdasarkan kepentingan pencapaian sasaran masing-masing keluaran dan kejelasan alur pertanggungjawaban pengambilan keputusan dan pelaporan dari segi teknis, manajerial, keuangan dan pengadaan barang dan jasa.

1. Penjelasan tentang Pelaksana

a. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup harus memiliki kemampuan menjabarkan, mensinkronkan, mengharmonisasikan, dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Atas dasar hal tersebut, maka KPA yang ditunjuk adalah pejabat aktif setingkat eselon II pada instansi provinsi yang berwenang di bidang lingkungan hidup.

b. Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Petugas Akuntansi

Persyaratan penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Penguji dan penandatanganan SPM, serta Petugas Akuntansi Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan penetapannya dilakukan oleh Gubernur. Seluruh pengelola keuangan yang tersebut diatas diharapkan tidak merangkap/melaksanakan tugas yang sama dalam pengelolaan keuangan Satuan Kerja selain Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup. Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat eselon III yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang perencanaan dan/atau kesekretariatan atau bidang lainnya yang terkait.

c. Koordinator Pelaksana

Koordinator Pelaksana sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing keluaran ditetapkan oleh KPA. Pelaksana tersebut harus memiliki kemampuan menjabarkan, mensinkronkan, mengharmonisasikan, dan mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing keluaran dekonsentrasi bidang lingkungan hidup. Atas dasar hal tersebut, maka Koordinator yang ditunjuk adalah pejabat aktif setingkat eselon III yang memiliki lingkup tugas pokok dan fungsi :

- 1) berkaitan langsung dengan pengendalian pencemaran, pengawasan lingkungan atau pengendalian dampak lingkungan untuk Keluaran Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
- 2) berkaitan langsung dengan pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian dampak lingkungan atau konservasi/pengelolaan

sumber daya alam untuk Keluaran Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

- 3) berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas untuk Keluaran Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Seluruh koordinator pelaksana membentuk tim pelaksana yang anggotanya berasal dari instansi lingkungan hidup dan instansi lain yang dipandang perlu dengan kapasitas dan kepentingan sesuai kebutuhan. Jumlah anggota tim pelaksana ditentukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan cakupan lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan. Tim pelaksana kegiatan ditetapkan oleh KPA.

d. Pejabat Eselon I KLH terkait

Pejabat eselon I KLH terkait dalam hal ini adalah pembina utama dan penentu target kinerja SKPD di bidang teknis bagi masing-masing sub keluaran. Pejabat eselon I KLH yang dimaksud adalah :

- 1) Deputi Bidang Tata Lingkungan (Deputi I KLH) yang merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran:
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan di Kabupaten/Kota
 - b) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL Kewenangan Pemerintah
- 2) Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Deputi II KLH) yang merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran:
 - a) Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER
 - b) Pemantauan Kualitas Udara di Wilayah Perkotaan yang Bersifat Strategis Nasional
 - c) Pengkajian Teknis Penetapan Kelas Air dan Rencana Umum Pemulihan Kualitas Lingkungan Sungai
- 3) Deputi Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perubahan Iklim (Deputi III KLH) yang merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran:
 - a) Inventarisasi Data Keanekaragaman Hayati
 - b) Desain Pengembangan Taman Kehati
 - c) Laporan Perubahan Tutupan Vegetasi dalam Rangka Menuju Indonesia Hijau (MIH)
 - d) Laporan Kegiatan Penyelamatan Danau
 - e) Pelaksanaan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Laut
 - f) Pengembangan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
 - g) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - h) Inventarisasi Data untuk Kajian Resiko dan Perubahan Iklim
 - i) Inventarisasi Upaya Lokal untuk Menghadapi Perubahan Iklim

- j) Identifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Inisiatif Lokal
- 4) Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah (Deputi IV) yang merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran:
 - a) Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER
 - b) Pembinaan Pelaksanaan dan Pengawasan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 5) Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan (Deputi V KLH) yang merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran:
 - a) Inventarisasi dan Klarifikasi Pengaduan Kasus-kasus Lingkungan Hidup
 - b) Inventarisasi dan Klarifikasi Sengketa Lingkungan Hidup yang Berpotensi Menimbulkan Kerugian bagi Masyarakat sebagai Hak Milik Privat atau Lingkungan Hidup sebagai Hak Milik Publik/Negara
 - c) Inventarisasi dan Klarifikasi Dugaan Tindak Pidana Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - d) Sosialisasi dan Pemantauan Penataan terhadap 12 Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi Indonesia
- 6) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan (Deputi VI KLH) yang merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait sub keluaran:
 - a) Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Program Nasional
 - b) Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Adiwiyata
 - c) Pembinaan Pengawasan Inventarisasi Pendataan Masyarakat Hukum Adat yang Menerapkan Kearifan Lingkungan

e. Pejabat Eselon II KLH terkait

Pejabat eselon II KLH terkait dalam hal ini adalah pendamping, pelaksana asistensi, serta sumber referensi SKPD di bidang teknis bagi masing-masing sub keluaran. Pejabat eselon II KLH yang dimaksud adalah :

- 1) Kepala Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Kapusarpedal) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pemantauan Sungai Skala Nasional dan/atau Lintas Batas Negara
- 2) Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri pada Sekretariat KLH (Karo PKLN) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai DAK Bidang LH
- 3) Asisten Deputi Pengkajian Dampak Lingkungan pada Deputi I KLH (Asdep 4/I KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran :
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan di Kabupaten/Kota

- b) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL Kewenangan Pemerintah
- 4) Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana, dan Jasa pada Deputi II KLH (Asdep 1/II KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER
 - 5) Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi, dan Migas pada Deputi II KLH (Asdep 2/II KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER
 - 6) Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil pada Deputi II KLH (Asdep 3/II KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER
 - 7) Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak pada Deputi II KLH (Asdep 4/II KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pemantauan Kualitas Udara di Wilayah Perkotaan yang Bersifat Strategis Nasional
 - 8) Asisten Deputi Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan pada Deputi III KLH (Asdep 1/III KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran:
 - a) Inventarisasi Data Keanekaragaman Hayati
 - b) Desain Pengembangan Taman Kehati
 - c) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - d) Laporan Perubahan Tutupan Vegetasi dalam Rangka Menuju Indonesia Hijau (MIH)
 - 9) Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat pada Deputi III KLH (Asdep 2/III KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran :
 - a) Laporan Kegiatan Penyelamatan Danau
 - 10) Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut pada Deputi III KLH (Asdep 3/III KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran :
 - a) Pelaksanaan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Laut
 - 11) Asisten Deputi Mitigasi dan Perlindungan Fungsi Atmosfer pada Deputi III KLH (Asdep 4/III KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran :
 - a) Pengembangan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
 - b) Inventarisasi Data untuk Kajian Resiko dan Perubahan Iklim
 - 12) Asisten Deputi Adaptasi Perubahan Iklim pada Deputi III KLH (Asdep 5/III KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran :
 - a) Inventarisasi Upaya Lokal untuk Menghadapi Perubahan Iklim
 - b) Identifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Inisiatif Lokal

- 13) Asisten Deputi Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 pada Deputi IV KLH (Asdep 3/IV KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER
- 14) Asisten Deputi Pengelolaan Sampah pada Deputi IV KLH (Asdep 4/IV KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pembinaan Pelaksanaan dan Pengawasan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 15) Asisten Deputi Pengaduan dan Penataan Hukum Administrasi Lingkungan pada Deputi V KLH (Asdep 1/V KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Inventarisasi dan Klarifikasi Pengaduan Kasus-kasus Lingkungan Hidup
- 16) Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Deputi V KLH (Asdep 2/V KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Inventarisasi dan Klarifikasi Sengketa Lingkungan Hidup yang Berpotensi Menimbulkan Kerugian bagi Masyarakat sebagai Hak Milik Privat atau Lingkungan Hidup sebagai Hak Milik Publik/Negara
- 17) Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan pada Deputi V KLH (Asdep 3/V KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Inventarisasi dan Klarifikasi Dugaan Tindak Pidana Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 18) Asisten Deputi Perjanjian Internasional Lingkungan pada Deputi V KLH (Asdep 4/V KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Sosialisasi dan Pemantauan Penataan terhadap 12 Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi Indonesia
- 19) Asisten Deputi Komunikasi Lingkungan pada Deputi VI KLH (Asdep 1/VI KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Program Nasional
- 20) Asisten Deputi Penguatan Inisiatif Masyarakat pada Deputi VI KLH (Asdep 2/VI KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Adiwiyata
- 21) Asisten Deputi Peningkatan Peran Masyarakat pada Deputi VI KLH (Asdep 3/VI KLH) yang melaksanakan tugas terkait sub keluaran Pembinaan Pengawasan Inventarisasi Pendataan Masyarakat Hukum Adat yang Menerapkan Kearifan Lingkungan

f. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion wilayah kerja terkait

Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion KLH (PPE KLH) adalah pejabat setingkat Eselon II KLH yang bertugas melaksanakan koordinasi perencanaan dekonsentrasi, mengkoordinir penyampaian laporan SKPD, dan penyelenggaraan kerjasama antar SKPD dalam wilayah kerjanya masing-masing. Kepala PPE KLH tersebut adalah :

- 1) Kepala PPE Sumatera yang mengkoordinir Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kepulauan

- Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka-Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung
- 2) Kepala PPE Jawa yang mengkoordinir Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur
 - 3) Kepala PPE Kalimantan yang mengkoordinir Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah
 - 4) Kepala PPE Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) yang mengkoordinir Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
 - 5) Kepala PPE Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sumapapua) yang mengkoordinir Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat

2. Struktur dan Alur Pertanggungjawaban Manajerial dan Akuntabilitas

a. Perencanaan

Penganggaran dekonsentrasi wajib dituangkan dalam RKA-KL Kementerian Lingkungan Hidup untuk ditetapkan sebagai Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) oleh Menteri Keuangan. RKA-KL yang telah ditetapkan tersebut wajib diserahkan Menteri selaku Pengguna Anggaran kepada Gubernur.

Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan yang mencakup Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Petugas Akuntansi untuk dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

KPA menetapkan Tim Pelaksana bagi masing-masing keluaran yang terdiri dari Koordinator dan anggotanya dengan kriteria sebagaimana disebutkan diatas. Koordinator Pelaksana wajib menyusun :

- 1) Perencanaan kas keluaran masing-masing berdasarkan RKA-KL untuk disampaikan kepada PPK
- 2) Perencanaan kinerja berdasarkan target yang ditetapkan
- 3) Pengelolaan sistem pelaporan agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

KPA mempersiapkan dan melaksanakan rencana dan organisasi pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Penyaluran Dana dan pengelolaan Barang Milik Negara hasil pelaksanaan Dekonsentrasi

Penyaluran dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara melalui Rekening Kas Umum Negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan barang milik negara. Barang-barang tersebut harus digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan ditatausahakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik daerah.

c. Pertanggungjawaban dan pelaporan manajerial dan akuntabilitas

Laporan manajerial dan laporan akuntabilitas disusun sebagai satu kesatuan dan disampaikan per-triwulan serta akhir tahun. Laporan ini diserahkan kepada Gubernur untuk disampaikan kepada Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan menteri yang membidangi perencanaan nasional.

Laporan manajerial mencakup :

- 1) Perkembangan realisasi penyerapan dana
- 2) Pencapaian target keluaran
- 3) Kendala yang dihadapi
- 4) Saran tindak

Laporan keuangan mencakup :

- 1) Neraca keuangan
- 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Format laporan-laporan diatas adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

3. Struktur dan Alur Pertanggungjawaban Teknis Kegiatan

a. Acuan dan Perencanaan Kinerja

Kegiatan teknis dekonsentrasi yang dilaksanakan SKPD harus menggunakan dasar-dasar berikut :

- 1) Indikator dan Target Kinerja
- 2) Perencanaan untuk Pencapaian Target Kinerja

Indikator kinerja yang harus diperhatikan adalah **Indikator Kinerja Kegiatan**, yaitu indikator pencapaian penyelenggaraan dekonsentrasi SKPD-SKPD provinsi yang ditetapkan oleh Menteri; dan **Indikator Kinerja Keluaran (Output)**, yaitu indikator pencapaian masing-masing Keluaran dari lingkup dekonsentrasi kepada SKPD-SKPD provinsi yang ditetapkan oleh Menteri.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

- 1) Jumlah provinsi yang melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan
- 2) Jumlah provinsi yang melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan
- 3) Jumlah provinsi yang melaksanakan peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH

Ketiga indikator diatas memiliki target masing-masing 32 (tiga puluh dua) dengan satuan Provinsi. Oleh sebab itu, salah satu atau lebih provinsi tidak mampu melaksanakan mandat dekonsentrasinya akan menyebabkan keseluruhan target tidak tercapai.

Indikator Kinerja Keluaran (Output) adalah :

- 1) Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan tingkat provinsi
- 2) Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan tingkat provinsi
- 3) Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan LH tingkat provinsi

Ketiga indikator diatas memiliki target masing-masing berupa penjumlahan total dari jumlah laporan teknis per keluaran yang diamanahkan ke tiap-tiap provinsi. Oleh sebab itu, target kinerja keluaran ini harus dirinci kembali dalam struktur berikut :

- 1) Target Kinerja Keluaran keseluruhan adalah penjumlahan dari target kinerja keluaran masing-masing Provinsi dengan satuan ukur Laporan
- 2) Target Kinerja Keluaran Provinsi adalah penjumlahan dari target kinerja sub keluaran Provinsi dengan satuan ukur Laporan

Indikator dan Target Kinerja sebagaimana disebutkan diatas ditetapkan dalam Lampiran II yang tak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Setiap KPA mewajibkan masing-masing Koordinator Pelaksana untuk menyusun Rencana Kinerja Pencapaian Target yang telah ditetapkan dan menggunakannya sebagai acuan dalam bekerja. Kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kinerja maupun Rencana Kas sangat mempengaruhi penilaian kinerja SKPD dan akan digunakan sebagai salah satu variabel dalam pengawasan dan evaluasi.

b. Mekanisme Koordinasi, Asistensi, dan Konsultasi

Keseluruhan pengorganisasian koordinasi, asistensi dan konsultasi pelaksanaan dekonsentrasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Masing-masing eselon I KLH wajib melaksanakan rapat koordinasi teknis/substansi nasional dalam rangka perencanaan dan/atau evaluasi maksimal 2 (dua) kali setahun yang dihadiri seluruh SKPD dalam rangka perencanaan dan evaluasi hasil kegiatan. Jumlah total rapat koordinasi nasional tersebut tidak

boleh lebih dari 6 (enam) kali setahun untuk menjamin efisiensi pemanfaatan anggaran perjalanan dinas peserta. Hal ini mengimplikasikan penyelenggaraan yang bersifat terpadu antar eselon I KLH untuk meminimalkan jumlah pertemuan.

- 2) Seluruh eselon II yang terkait dengan sub keluaran yang didekonsentrasikan wajib melaksanakan bimbingan dan asistensi teknis terhadap SKPD yang dibiayai dari anggaran unitnya masing-masing. Bimbingan teknis yang diberikan harus memuat sekurang-kurangnya upaya :
 - a) Pemberian manual pelaksanaan dan manual pelaporan teknis
 - b) Asistensi dan pengarahan apabila dibutuhkan SKPD
 - c) Review/penilaian dan pemberian masukan atas hasil pelaksanaan
- 3) Seluruh kepala PPE yang wilayah kerjanya terkait wajib melaksanakan koordinasi pelaporan teknis dari SKPD untuk disampaikan kepada eselon II dan eselon I KLH terkait dan memfasilitasi kebutuhan kerjasama antar daerah dalam bentuk-bentuk diantaranya :
 - a) Sinkronisasi jadwal, lokasi, dan metoda pelaksanaan
 - b) Harmonisasi dan/atau integrasi pelaporan untuk mendapatkan informasi yang utuh
 - c) Kerjasama formal yang dikuatkan dengan MoU antar Provinsi dalam bentuk penggabungan kontrak dengan pihak ketiga bersama, *joint service*, atau transfer tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundangan dan harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- 4) Seluruh SKPD dapat melaksanakan kerjasama antar daerah dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan dan menyelenggarakan penyampaian laporan teknis melalui PPE.

c. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Teknis

Jenis-jenis laporan teknis sebagaimana disebutkan dalam Lampiran IV dan bukan Laporan Manajerial maupun Laporan Akuntabilitas disampaikan dalam aturan sebagai berikut :

- 1) Koordinator Pelaksana menyampaikan laporannya kepada KPA dan Eselon II KLH terkait dengan tembusan kepada PPE.
- 2) Kumpulan laporan dari masing-masing Koordinator Pelaksana diintegrasikan dalam laporan terpadu oleh KPA untuk disampaikan kepada Gubernur dan Eselon I KLH terkait
- 3) Gubernur menyampaikan laporan teknis Provinsinya sesuai yang telah dikompilasikan kepada Menteri.
- 4) Eselon I KLH menyampaikan kompilasi laporan teknis dari berbagai Provinsi sesuai bidang tugasnya kepada Menteri.

B. TATA LAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN

Administrasi dekonsentrasi mencakup pelaksanaan :

1. Administrasi pengadaan barang dan jasa
2. Pengelolaan keuangan dana Dekonsentrasi, mencakup diantaranya:

- a. Mempelajari teknis pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
 - c. Membuka rekening ke Bank Pemerintah;
 - d. Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak ke kantor Pelayanan Pajak;
 - e. Menyiapkan Buku Kas Umum/Buku Kas Harian, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran;
 - f. Menyiapkan buku pembantu pengawasan pelaksanaan Mata Anggaran Kegiatan (MAK);
 - g. Menyiapkan Buku Uang Muka, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak;
 - h. Menyiapkan surat keputusan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran seperti Tim Teknis atau Kelompok Kerja;
 - i. Membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja, yang tugasnya dirangkap oleh para pengelola anggaran;
 - j. Menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran per triwulan.
3. Penatausahaan barang milik negara yang diperoleh dari dana Dekonsentrasi dan pemeliharaan/operasionalnya sebelum dihibahkan
 4. Pelaporan manajerial dan akuntabilitas
 5. Penyediaan peralatan penunjang administrasi dekonsentrasi

Pelaksanaan seluruh kegiatan diatas mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan penyelenggaraannya dibiayai dari Dana Dekonsentrasi. Biaya yang ditimbulkan dalam administrasi kegiatan dibebankan pada Keluaran Peningkatan Kapasitas PSDA dan LH dalam sub Keluaran Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH.

C. PENJELASAN BELANJA DEKONSENTRASI BIDANG LH

1. Batasan Barang yang Tidak Dapat Diadakan dengan Anggaran Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup

Dalam batang tubuh peraturan ini ditetapkan bahwa dana dekonsentrasi tidak dapat digunakan untuk: a) pembangunan gedung kantor dan fasilitasnya, b) pengadaan kendaraan dinas, c) perjalanan ke luar negeri, dan d) biaya rutinitas kantor yang dibiayai APBD.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, dana dekonsentrasi tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan aset tetap, sehingga dana dekonsentrasi juga tidak dapat digunakan untuk :

- a. membangun infrastruktur/prasarana lingkungan hidup (contoh: instalasi pengolahan air limbah terpadu, laboratorium lingkungan hidup)

- b. membangun fasilitas publik untuk lingkungan hidup (contoh: perpustakaan lingkungan hidup)
- c. membeli peralatan selain pendukung operasional kegiatan dan contoh demo/model.

2. Batasan Barang yang Dapat Diadakan dengan Anggaran Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup

Barang-barang yang dapat diadakan dengan anggaran dekonsentrasi meliputi :

- a. Perangkat pengolah data dan laporan (komputer berikut perlengkapannya dan perangkat lunak pengolah data) maksimal 2 buah per keluaran.
- b. Perangkat kerja lainnya, termasuk perangkat pengolah data khusus yang disyaratkan salah satu sub keluaran dalam petunjuk teknis.
- c. Contoh/model/prototipe/demo peralatan/kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam rangka pembinaan dan bagian dari metoda dan tahapan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Lampiran IV atau ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Eselon I KLH terkait.

Barang-barang diatas harus ditatausahakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 pasal 37A. Barang-barang tersebut wajib diserahterimakan kepada SKPD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang dengan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku.

3. Belanja Jasa Profesi, Jasa Lainnya, dan Kontraktual

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, dianjurkan untuk secara optimal memanfaatkan akun belanja jasa profesi, jasa lainnya, dan jasa kontraktual bagi :

- a. Tahapan dan/atau komponen kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus dan dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa profesional (contoh: jasa analisis sampel, survai lapangan, disain teknis, pembuatan produk/barang tertentu, dan lain-lain)
- b. Tahapan dan/atau komponen kegiatan yang membutuhkan banyak sumber daya manusia dan waktu dan dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa profesional (contoh: penyelenggaraan acara pertemuan, dan lain-lain)
- c. Tahapan dan/atau komponen kegiatan yang membutuhkan masukan pakar/narasumber ahli (contoh : pembuatan bahan materi pembinaan teknis, pelaksanaan sosialisasi, dan lain-lain)

4. Standar biaya dan Surat Tanda Pertanggungjawaban Mutlak

Standar biaya yang digunakan adalah Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011. Apabila terdapat satuan biaya yang tidak diatur dalam ketentuan tersebut, dapat dipergunakan standar Harga

Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Satuan biaya yang tidak dapat mengacu SBU maupun HPS KLH dapat diajukan dengan perkiraan sendiri selama disertai alasan yang patut dan dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani KPA berikut data-data pendukung lainnya (contoh : bukti standar harga yang berlaku di pasar).

5. Struktur umum pembiayaan masing-masing keluaran

a. Administrasi Kegiatan

Anggaran administrasi kegiatan diletakkan dalam Keluaran Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH di bawah Sub Keluaran Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dengan DAK Bidang LH dengan rincian belanja sebagai berikut:

- 1) Biaya pengelolaan keuangan, mencakup :
 - a) Honorarium pejabat pengelola keuangan (KPA, PPK, Bendahara, Pejabat SPM, dan Petugas-petugas Akuntansi)
 - b) Biaya proses pembukuan dan pelaporan keuangan, termasuk bahan dan ATK.
- 2) Biaya administrasi pengadaan barang dan jasa, mencakup :
 - a) Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa
 - b) Honorarium pejabat pemeriksa/penerima barang dan jasa
 - c) Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa
 - d) Honorarium narasumber bila diperlukan
 - e) Biaya pengumuman penawaran pengadaan barang dan jasa
 - f) Biaya proses penilaian pengadaan barang dan jasa, termasuk bahan dan ATK
- 3) Biaya penatausahaan barang milik negara, mencakup :
 - a) Honorarium pelaksana pengelola barang milik negara
 - b) Biaya proses pengelolaan barang milik negara, termasuk bahan dan ATK
- 4) Biaya pelaporan
 - a) Biaya perjalanan untuk kehadiran dalam Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup Regional untuk perencanaan sebanyak 2 (dua) orang
 - b) Biaya perjalanan untuk kehadiran dalam Rapat Koordinasi Nasional untuk perencanaan sebanyak 2 (dua) orang
 - c) Biaya proses pengelolaan barang milik negara, termasuk bahan dan ATK
- 5) Peralatan penunjang berupa alat pengolah data siap pakai untuk pelaporan kegiatan maksimal 2 (dua) unit.

b. Struktur Pembiayaan Keluaran

Struktur pembiayaan masing-masing keluaran diluar biaya administrasi kegiatan sebagaimana diatur dalam huruf a, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Honorarium bulanan (orang-bulan/OB) pelaksana adalah berbasis Keluaran. Pelaksana tidak bisa menerima honorarium bulanan dari tiap-tiap sub keluaran.
- 2) Honorarium pelaksana sub keluaran adalah berbasis jumlah kegiatan yang dilaksanakan (orang-kali/OK). Pelaksana sub keluaran sebaiknya tidak merangkap di sub keluaran lainnya.
- 3) Tidak diperkenankan mengalokasikan belanja dalam akun belanja modal.
- 4) Barang-barang penunjang yang dibutuhkan sub keluaran dialokasikan dalam akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi yang Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah atau Masyarakat
- 5) Menganggarkan biaya untuk setiap sub output dan tahapan/komponen sesuai Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan.

D. FORMAT LAPORAN

1. Laporan Manajerial disusun sesuai format dan dilaporkan berdasarkan tata laksana sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
2. Laporan Akuntabilitas disusun sesuai format dan dilaporkan berdasarkan tata laksana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Dan Humas,

Inar Ichsana Ishak

**PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PENINGKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH**

A. METODA DAN TAHAPAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Sasaran Kegiatan

Terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah

Indikator Kinerja Kegiatan

- 1 Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan di daerah
- 2 Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan di daerah
- 3 Jumlah provinsi yang menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah

KELUARAN (OUTPUT) PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Indikator Kinerja Keluaran

- 1 Laporan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER
- 2 Laporan pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional
- 3 Laporan pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional
- 4 Laporan pemantauan sungai skala nasional dan/atau lintas batas negara
- 5 Laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah melalui 3R

Sub Output: Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pengelolaan kualitas air dan udara skala nasional melalui program PROPER

Hasil yang harus dilaporkan

- a Kriteria yang mempertimbangkan kondisi daerah
- b Jumlah sertifikat yang diberikan kepada peserta pelatihan pelaksana PROPER
- c Laporan pelaksanaan sosialisasi PROPER kepada asosiasi industri
- d Laporan pelaksanaan inspeksi beserta kelengkapan dokumennya
- e Rapor sementara peringkat PROPER
- f Peringkat sementara PROPER
- g Laporan penanganan dan review sanggahan dan/atau klarifikasi perusahaan

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Penetapan kriteria PROPER Penguatan kapasitas Sosialisasi kepada asosiasi industri	Honor pelaksana Peralatan penunjang bila perlu Narasumber Pertemuan Perjalanan Akomodasi peserta	Kuartal I	Kriteria PROPER Jumlah sertifikat peserta Laporan sosialisasi	Asdep Pengendalian Pencemaran akibat Pertambangan, Energi dan Migas Asdep Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Akibat Kontaminasi Limbah B3
2	Inspeksi	Pelaksanaan inspeksi	Perjalanan Sewa kendaraan Jasa analisa sampel	Kuartal II-III	Laporan inspeksi	
3	Pasca inspeksi	Penyusunan rapor sementara Penetapan dan penyampaian peringkat sementara Penanganan dan review sanggahan/klarifikasi perusahaan	Pertemuan Perjalanan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal III	Rapor sementara Peringkat sementara Laporan penanganan sanggahan/klarifikasi	

Sub Output: Pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai yang melewati perkotaan yang menjadi prioritas nasional

Hasil yang harus dilaporkan

- a Proposal pemantauan
- b Laporan hasil pemantauan
- c Laporan pelaksanaan asistensi kepada Kabupaten/kota

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Koordinasi	Honor pelaksana Pertemuan Perjalanan	Kuartal I	Proposal pemantauan	Asdep Pengendalian Pencemaran akibat Manufaktur, Prasarana dan Jasa
2	Pemantauan	Pelaksanaan pemantauan	Perjalanan Sewa kendaraan Jasa analisa sampel	Kuartal II-III	Laporan hasil pemantauan	
3	Asistensi	Pelaksanaan asistensi teknis	Pertemuan			

			Narasumber Perjalanan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal III	Laporan asistensi	
--	--	--	--	-------------	-------------------	--

Sub Output: Pemantauan kualitas udara di wilayah perkotaan yang bersifat strategis nasional

Hasil yang harus dilaporkan

- a Laporan pelaksanaan persiapan pemantauan
- b Data pemantauan
- c Laporan hasil pemantauan
- d Laporan pelaksanaan asistensi

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Koordinasi perencanaan dan pra-survey Survey lokasi Penyiapan petugas pelaksana	Honor pelaksana Pertemuan Peralatan penunjang Narasumber Jasa petugas Sewa kendaraan Perjalanan	Kuartal I	Laporan pelaksanaan	Asdep Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak
2	Pemantauan	Pemantauan <i>road-side</i> Analisis sampel BBM Pemantauan kinerja lalu lintas Uji petik kendaraan bermotor	Perjalanan Sewa kendaraan Biaya petugas Jasa analisa sampel Biaya operasi alat Biaya sarana uji petik Pertemuan Penggandaan/ pencetakan Bahan dan ATK	Kuartal II-III	Data pemantauan	
3	Kompilasi data	Pelaksanaan kompilasi data	Biaya petugas Pertemuan Bahan dan ATK	Kuartal III	Laporan hasil pemantauan	

			Penggandaan/ pencetakan			
4	Evaluasi dan asistensi	Bimbingan teknis Pelaporan	Honor narasumber Pertemuan Perjalanan Akomodasi Bahan dan ATK Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan pelaksanaan asistensi	

Sub Output: Pemantauan kualitas air sungai skala nasional dan/atau yang lintas batas negara

Hasil yang harus dilaporkan

- a Proposal pemantauan
- b Laporan hasil pemantauan
- c Data pemantauan
- d Laporan pelaksanaan asistensi kepada Kabupaten/kota

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Koordinasi	Honor pelaksana Pertemuan Perjalanan	Kuartal I	Proposal pemantauan	kepada Pusat Sarana Pengendalian
2	Pemantauan	Pelaksanaan pemantauan	Perjalanan Sewa kendaraan Jasa analisa sampel	Kuartal II-III	Laporan hasil pemantauan Data pemantauan	
3	Asistensi	Pelaksanaan asistensi teknis	Pertemuan Narasumber Perjalanan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal III	Laporan asistensi	

Sub Output: Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah perkotaan melalui 3R

Hasil yang harus dilaporkan

- a Laporan Kerangka Kerja Pelaksanaan Penerapan 3R
- b Laporan hasil pelaksanaan pilot project
- c Panduan Model Pengelolaan Lingkungan Perkotaan melalui Penerapan 3R
- d Laporan evaluasi

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Pesiapan	Inventarisasi dan survey Koordinasi dengan stakeholders	Honor pelaksana Pertemuan	Kuartal I	Laporan Kerangka Kerja Pelaksanaan Penerapan 3R	Asisten Deputi Pengelolaan Sampah
2	Pelaksanaan	Penyusunan kerangka kerja	Perjalanan	Kuartal II-III	Laporan hasil pelaksanaan pilot project	
		Pilot Project di 2 Kota Workshop/Seminar	Pertemuan Narasumber			
3	Evaluasi dan pelaporan	Transfer teknologi dan pengetahuan Penyusunan panduan	Penggandaan/ pencetakan Perjalanan/Akomoda si Bahan dan ATK	Kuartal III	Panduan Model Pengelolaan Lingkungan Perkotaan melalui Penerapan 3R Laporan evaluasi	
		Evaluasi dan pelaporan	Pertemuan Penggandaan/ pencetakan			

KELUARAN (OUTPUT) PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Indikator Kinerja Keluaran

- 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI
- 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI
- 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau
- 4 Laporan kegiatan penyelamatan danau
- 5 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut
- 6 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca
- 7 Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- 8 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim
- 9 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM
- 10 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD

Sub Output : Disain pengembangan Taman KEHATI

Hasil yang harus dilaporkan

- a Laporan identifikasi Taman KEHATI

b Laporan disain dasar taman KEHATI c Database KEHATI d Draft Rencana Aksi Pengelolaan Taman KEHATI						
	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Identifikasi Lokasi Taman KEHATI Kajian Budaya dan Ekologi Calon Lokasi Identifikasi areal Identifikasi jenis tumbuhan lokal prioritas	Honor pelaksana Kontraktual Pertemuan Perjalanan/ Akomodasi	Kuartal I	Laporan identifikasi Taman KEHATI	Asdep Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan

2	Pelaksanaan	Sosialisasi jenis daerah dan rancangan deliniasi area Penetapan jenis daerah dan deliniasi area Penyusunan disain dasar taman KEHATI Pemetaan disain	Narasumber Pengadaan data Pertemuan Kontraktual ATK dan Bahan	Kuartal II-III	Laporan disain dasar taman KEHATI	
3	Pelaporan	Penyusunan Database KEHATI Penyusunan Draft Rencana Aksi Pengelolaan Taman KEHATI	Pertemuan Narasumber Penggandaan/ pencetakan	Kuartal III	Database KEHATI Draft Rencana Aksi Pengelolaan Taman KEHATI	

Sub Output : Inventarisasi data dan informasi KEHATI

Hasil yang harus dilaporkan

- a Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI
- b Laporan Profil KEHATI

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Sosialisasi Identifikasi ketersediaan data dan informasi KEHATI	Honor pelaksana ATK dan bahan			

		Membangun Jejaring data dan informasi Penyediaan sarana dan prasarana Penyediaan SDM di daerah	Pertemuan Pengadaan data	Kuartal I		Asdep Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan
2	Pelaksanaan	Membangun Kesekretariatan Membangun mekanisme data dan informasi KEHATI Workshop	Biaya petugas Sewa kendaraan Perjalanan Pertemuan	Kuartal II-III	Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI	

			Akomodasi ATK dan bahan			
3	Pelaporan	Penyusunan profil KEHATI daerah Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan KEHATI daerah	Pertemuan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal III	Laporan Profil KEHATI	

Sub Output : Perubahan Tutupan Vegetasi Dalam Rangka Program Menuju Indonesia Hijau

Hasil yang harus dilaporkan a Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka MIH b Profil perubahan tutupan vegetasi Provinsi						
	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Koordinasi dan bimbingan teknis Penyiapan data untuk acuan verifikasi lapangan	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Pengadaan data Narasumber	Kuartal I		
2	Pelaksanaan	Survey perubahan tutupan vegetasi Survey pemantauan kabupaten nominator	Biaya petugas Sewa kendaraan Perjalanan	Kuartal II-III	Data pemantauan	Asdep Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan

			Pertemuan Akomodasi ATK dan bahan			
3	Evaluasi dan pelaporan	Verifikasi hasil survey dan evaluasi Penyusunan laporan	Pertemuan Narasumber Penggandaan/ pencetakan	Kuartal III	Laporan perubahan tutupan vegetasi	

Sub Output : Kegiatan Penyelamatan Danau

Hasil yang harus dilaporkan

a Laporan kegiatan penyelamatan danau

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Pengumpulan data dan informasi	Honor pelaksana			Asdep Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

		Koordinasi dengan stakeholders	ATK dan bahan Pertemuan Pengadaan data Narasumber	Kuartal I		
2	Pelaksanaan	Sosialisasi Pemantauan Bimbingan teknis kepada Kab/Kota	Biaya petugas Sewa kendaraan Perjalanan Pertemuan Akomodasi ATK dan bahan	Kuartal II-III		
3	Evaluasi dan pelaporan	Penyusunan laporan	Pertemuan Narasumber Penggandaan/ pencetakan	Kuartal III	Laporan kegiatan penyelamatan danau	

Sub Output : Pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut

Hasil yang harus dilaporkan

a Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Pemilihan dan Penentuan Lokasi Pembentukan kelompok Sosialisasi	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Narasumber	Kuartal I		Asdep Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut
2	Pelaksanaan	Pelaksanaan pembibitan Pemeliharaan bibit Gerakan penanaman bersama Pemeliharaan tanaman	Biaya petugas Pembelian bibit Pembelian alat Biaya Pemeliharaan	Kuartal II-III		
3	Evaluasi dan pelaporan	Pemantauan Evaluasi dan pelaporan	Perjalanan Narasumber Pertemuan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal III	Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut	

Sub Output : Pengembangan inventarisasi gas rumah kaca

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Koordinasi	Pembentukan tim pelaksana Koordinasi kegiatan di daerah Koordinasi dgn KLH	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Narasumber	Kuartal I		Asdep Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer
2	Asistensi	Workshop dasar2 pelaksanaan inventarisasi emisi GRK di daerah Workshop indentifikasi dan perhitungan potensi emisi GRK di daerah	Pertemuan Narasumber	Kuartal II-III		

		Workshop Analisis dan Pelaporan Emisi GRK di daerah	Akomodasi Bahan dan ATK		
3	Pelaporan	Penyusunan laporan Penyampaian laporan	Penggandaan/ pencetakan Pertemuan Biaya Pos	Kuartal III	Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca

Sub Output : pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Hasil yang harus dilaporkan

a Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Pembinaan dan Bintek	Pemantauan dan pengolahan data hotspot Pembuatan peta rawan kebakaran hutan dan lahan Evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat Prov dan Kab/Kota	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Narasumber	Kuartal I		Asdep Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan

2	Sosialisasi	Pembuatan dan pendistribusian bahan sosialisasi Sosialisasi dan penyuluhan langsung di tingkat desa dan kecamatan yang rawan kebakaran hutan dan lahan	Pertemuan/ Akomodasi Narasumber Perjalanan Bahan dan ATK	Kuartal II		
3	Peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA)	Identifikasi MPA Pembinaan dan Pendampingan	Penggandaan/ pencetakan Pertemuan	Kuartal II		

		Pemberian insentif MPA dalam patroli pencegahan dan pengawasan thd kebakaran hutan dan lahan	Biaya Pos		
4	Groundcheck dan investigasi serta pengawasan thd usaha/kegiatan	Identifikasi lokasi usaha atau kegiatan Penggalangan komitmen Groundcheck dan investigasi lapangan		Kuartal III	Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Sub Output : Inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim

Hasil yang harus dilaporkan

- a Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim
- b Jejaring kerja data pendukung KRAPI yang disahkan dengan SK Gubernur

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Sosialisasi KRAPI Perumusan jejaring kerja di daerah dalam pelaksanaan KRAPI Koordinasi Pusat dan Daerah	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan	Kuartal I		Asdep Adaptasi Perubahan Iklim

2	Pelaksanaan	Identifikasi sumber dan kualitas data yang tersedia Identifikasi sarana yang tersedia untuk akses data	Narasumber Perjalanan Pertemuan Narasumber Akomodasi Bahan dan ATK	Kuartal II-III		
3	Pelaporan	Penyusunan laporan Penyampaian laporan	Penggandaan/ pencetakan Pertemuan	Kuartal III	Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim	

Sub Output : Inventarisasi upaya lokal dalam menghadapi perubahan iklim untuk mendukung pelaksanaan PROKLIM

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Pembentukan Tim Inventarisasi Persiapan jadwal inventarisasi Penetapan lokasi kegiatan inventarisasi Pengumpulan data sekunder	Honor pelaksana Pertemuan Bahan dan ATK	Kuartal I		Asdep Adaptasi Perubahan Iklim
2	Pelaksanaan	Survey lapangan Analisa data dan informasi	Perjalanan Pertemuan Narasumber Pengadaan data Sewa kendaraan Biaya petugas ATK dan bahan Akomodasi	Kuartal I-IV		
3	Evaluasi dan pendampingan KLH	Evaluasi pencapaian awal pelaksanaan identifikasi	Pertemuan/ Akomodasi Narasumber Bahan dan ATK Perjalanan	Kuartal II		
4	Pelaporan	Penyusunan laporan Penyampaian laporan	Penggandaan/ pencetakan Pertemuan Akomodasi	Kuartal III	Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM	

Sub Output : Identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Pembentukan Tim Inventarisasi Penentuan ruang lingkup inventarisasi Perencanaan dan penentuan lokasi Inventarisasi data sekunder	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Narasumber Perjalanan	Kuartal I		Asdep Adaptasi Perubahan Iklim
2	Pelaksanaan	Analisa data sekunder Survey lapangan Penyusunan laporan survey	Pertemuan Narasumber Akomodasi Perjalanan Kontraktual	Kuartal II		
3	Evaluasi dan pendampingan KLH	Evaluasi pencapaian awal pelaksanaan identifikasi	Pertemuan/ Akomodasi Narasumber Bahan dan ATK Perjalanan	Kuartal II		
4	Pelaporan	Penyusunan laporan Penyampaian laporan	Penggandaan/ pencetakan Pertemuan Akomodasi	Kuartal III	Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD	

KELUARAN (OUTPUT) PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SDA DAN LH

Indikator Kinerja Keluaran

- 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan
- 2 Laporan pembinaan penyusunan PDRB Hijau
- 3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)
- 4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/ telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat
- 5 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan
- 6 Laporan sosialisasi dan pemantauan penataan terhadap 12 konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia
- 7 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA

- 8 Laporan pembinaan dan pengawasan inventarisasi data masyarakat hukum adat yang melaksanakan kearifan lingkungan
- 9 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kampanye program nasional
- 10 Laporan pembinaan dan revitalisasi peran penerima anugerah Kalpataru
- 11 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah
- 12 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH

Sub Output : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)

Hasil yang harus dilaporkan

a

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan RKL-RPL di daerah	Persiapan Pelaksanaan Pasca pelaksanaan	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan Honor narasumber Sewa kendaraan Pengiriman surat Penggandaan/ pencetakan	Kuartal I		Asdep Kajian Dampak Lingkungan
2	Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Daerah	Persiapan Pelaksanaan Pasca pelaksanaan	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan	Kuartal II-III		

			Honor narasumber Sewa kendaraan Pengiriman surat Penggandaan/ pencetakan			
--	--	--	--	--	--	--

3	Evaluasi Mutu Dokumen AMDAL	Persiapan Pelaksanaan Pasca pelaksanaan	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan Honor narasumber Sewa kendaraan Pengiriman surat Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)
---	-----------------------------	---	---	------------	--

Sub Output : pembinaan penyusunan PDRB Hijau

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan pembinaan penyusunan PDRB Hijau

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Persiapan Awal Pelaksanaan Bintek a. Pembentukan Tim Pelaksana b. Pembentukan Tim Pemantau c. Penyusunan jadwal kegiatan, penentuan narasumber dan lokasi survei, penyiapan materi tes pra dan post bintek Koordinasi pelaksanaan a. Koordinasi dgn dinas terkait b. Koordinasi dgn pemda lokasi survei c. Koordinasi dgn narasumber d. Koordinasi dgn pengelola lokasi pelatihan/workshop	Honor pelaksana Pertemuan Bahan dan ATK Narasumber	Kuartal I	Proposal Bintek	Asdep Ekonomi Lingkungan

		Survei pendahuluan a. Pertemuan persiapan tim survei b. Pelaksanaan survey lapangan c. Penyusunan notulen survei				
--	--	---	--	--	--	--

2	Pelaksanaan Bimtek	Workshop Survey lapangan Asistensi dan penyempurnaan penyusunan PDRB hijau	Perjalanan Pertemuan Narasumber ATK dan bahan Jasa evaluasi	Kuartal II	
3	Asistensi dan evaluasi pelaksanaan	Evaluasi	Pertemuan Narasumber ATK dan Bahan	Kuartal III	
4	Pelaporan	Persiapan pelaporan (pengumpulan data hasil evaluasi) Penyusunan laporan Pengiriman laporan	Pertemuan Narasumber ATK dan Bahan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan pembinaan penyusunan PDRB Hijau

Sub Output : Inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)

Hasil yang harus dilaporkan

a Laporan Inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Inventarisasi	Pencatatan pengaduan Klarifikasi Briefing petugas	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan	Kuartal I		Asdep Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan
2	Verifikasi	Penyiapan Bahan Verifikasi Lapangan Rekomendasi Evaluasi	Honor narasumber Pertemuan ATK dan bahan Analisa Lab Perjalanan	Kuartal II-III		

			Penggandaan/ pencetakan			
--	--	--	----------------------------	--	--	--

3	Peningkatan Kapasitas	Sosialisasi	Pertemuan Narasumber Bahan/ATK Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan Inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)
---	-----------------------	-------------	--	------------	--

Sub Output : inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Koordinasi	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Penggandaan	Kuartal I		Asdep Penyelesaian Sengketa Lingkungan
2	Pelaksanaan	Inventarisasi Klarifikasi Lapangan	Honor narasumber Pertemuan Sewa Kendaraan Analisa Lab Perjalanan Penggandaan	Kuartal II-III		
3	Pelaporan	Penyusunan Laporan	Pertemuan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai	

Sub Output : inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Inventarisasi	Koordinasi Rekapitulasi dugaan kasus	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Penggandaan	Kuartal I		Asdep Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
2	Klarifikasi	Klarifikasi	Honor narasumber Pertemuan Sewa Kendaraan Analisa Lab Perjalanan Penggandaan	Kuartal II-III		
3	Pelaporan	Penyusunan Laporan	Pertemuan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau	

Sub Output : sosialisasi dan pemantauan penataan terhadap 12 konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia

Hasil yang harus dilaporkan

a Laporan sosialisasi dan pemantauan penataan terhadap 12 konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Koordinasi Pembentukan Tim Verifikasi	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Penggandaan	Kuartal I		Asdep Penataan Hukum Lingkungan Internasional
2	Pelaksanaan	Identifikasi potensi dan verifikasi kasus lingkungan lintas batas - Pengambilan sample - Analisa lboratorium Sosialisasi	Honor narasumber Pertemuan Sewa Kendaraan Analisa Lab Perjalanan Penggandaan	Kuartal II		

3	Pelaporan	Penyusunan Laporan	Pertemuan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal III		
4	Pemantauan	Pemantauan Lapangan	Pertemuan Pengiriman surat/fax Narasumber Penggandaan	Kuartal IV	Laporan sosialisasi dan pemantauan penataan terhadap 12 konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia	

Sub Output : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Koordinasi dengan Kab/Kota	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan Honor narasumber	Kuartal I		Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat
2	Pelaksanaan	Sosialisasi Program ke Kab/Kota Bimbingan teknis ke Kab/Kota dalam rangka pembinaan sekolah Membuat pilot project untuk 4 satuan sekolah yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK) Menilai dan menetapkan sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi	Honor narasumber Pertemuan Perjalanan ATK dan Bahan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal II-III		
3	Evaluasi dan pelaporan	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ke tingkat Pusat	Pertemuan Narasumber Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA	

--	--	--	--	--	--	--

Sub Output : Pembinaan dan pengawasan inventarisasi data masyarakat hukum adat yang melaksanakan kearifan lingkungan

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan pembinaan dan pengawasan inventarisasi data masyarakat hukum adat yang melaksanakan kearifan lingkungan

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Identifikasi Masy. Hukum adat Identifikasi kearifan lingkungan yang ada Pertemuan koordinasi dgn daerah	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan Honor narasumber	Kuartal I		Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat
2	Pelaksanaan	Inventarisasi (basis data) Verifikasi data di lapangan	Honor narasumber Perjalanan Pertemuan	Kuartal II-III		
3	Evaluasi dan pelaporan	Penyusunan laporan	Pertemuan Narasumber Bahan dan ATK Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan pembinaan dan pengawasan inventarisasi data masyarakat hukum adat yang melaksanakan kearifan lingkungan	

Sub Output : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kampanye program nasional

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kampanye program nasional
b Rencana tindak kampanye dan publikasi lingkungan terkait dengan isu lokal

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
--	-------------------	---------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------

1	Penyusunan Materi	Penentuan isu lokal	Honor pelaksana			
---	-------------------	---------------------	-----------------	--	--	--

		Identifikasi capaian kinerja Provinsi dalam penyelesaian isu kearifan lokal 2012 dan target 2013 (result based approach) Penentuan perubahan perilaku Identifikasi stakeholder Identifikasi khalayak sasaran Perumusan pesan Penentuan Media	ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan Honor narasumber	Kuartal I-II	Rencana tindak kampanye dan publikasi lingkungan terkait dengan isu lokal	Asdep Komunikasi Lingkungan
2	Pelaksanaan	Kampanye dan publikasi isu lokal	Paket kampanye	Kuartal III		
3	Evaluasi dan pelaporan	Penyusunan laporan	Pertemuan Narasumber Bahan dan ATK Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kampanye	

Sub Output : Pembinaan dan revitalisasi peran penerima anugerah Kalpataru

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan pembinaan dan revitalisasi peran penerima anugerah Kalpataru

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Pembinaan	Sinkronisasi/Koordinasi perencanaan Penyebarluasan informasi melalui berbagai media Sosialisasi Identifikasi dan pembinaan calon Kalpataru Pengumpulan data calon	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Narasumber Perjalanan	Kuartal I-II		Asdep Peningkatan Peran Masyarakat

		Pengusulan calon Penyusunan laporan	Pengiriman surat Penggandaan/ Pencetakan			
--	--	--	--	--	--	--

2	Revitalisasi peran penerima anugerah Kalpataru	Baseline Study: penentuan target grup, isu lingkungan dan lokasi kegiatan Koordinasi dengan para pihak Pembekalan tematik Kegiatan out-door monitoring dan evaluasi Penyusunan laporan	Pertemuan Narasumber ATK dan bahan Penggandaan	Kuartal III-IV	Laporan pembinaan dan revitalisasi peran penerima anugerah Kalpataru	
---	--	---	---	----------------	--	--

Sub Output : Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah

Hasil yang harus dilaporkan

a Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Klasifikasi/pemetaan kompetensi laboratorium penerima DAK LH	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan	Kuartal I		Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal)
2	Pelaksanaan	Penyusunan materi Penetapan peserta/pengajar/narasumber dan instruktur Bimtek Pemanfaatan Laboratorium DAK-LH	Pertemuan Honor pengajar/narasumber dan instruktur ATK dan bahan Penggandaan	Kuartal II-III		
3	Pelaporan	Penyusunan laporan	Pertemuan ATK dan Bahan Penggandaan/ Pencetakan	Kuartal IV	Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi	

Sub Output : Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH

Sub Output . Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Inventarisasi lokasi pemantauan Koordinasi dengan daerah Kab/Kota penerima DAK LH	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan Honor narasumber	Kuartal I		Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
2	Pelaksanaan	Pemantauan lapangan Kompilasi data hasil pemantauan	Sewa kendaraan Uang harian Penginapan Pertemuan	Kuartal II-III		
3	Evaluasi dan pelaporan	Pertemuan evaluasi dengan KLH Penyusunan laporan	Pertemuan Narasumber ATK dan bahan Perjalanan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	

B. PELAPORAN KEGIATAN

Laporan teknis harus memuat: a) kumpulan data dan informasi yang wajib dikumpulkan; b) hasil analisis terhadap data dan informasi tersebut, serta intisari dari seluruh rangkaian proses pelaksanaannya. Rincian lebih lanjut ditetapkan oleh Eselon I KLH terkait.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

KELUARAN (OUTPUT) PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Indikator Kinerja Keluaran

- 1 Laporan disain pengembangan Taman KEHATI
- 2 Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI
- 3 Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program Menuju Indonesia Hijau
- 4 Laporan kegiatan penyelamatan danau
- 5 Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut
- 6 Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca
- 7 Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- 8 Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim
- 9 Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM
- 10 Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD

Sub Output : Disain pengembangan Taman KEHATI

Hasil yang harus dilaporkan

- a Laporan identifikasi Taman KEHATI
- b Laporan disain dasar taman KEHATI
- c Database KEHATI
- d Draft Rencana Aksi Pengelolaan Taman KEHATI

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Identifikasi Lokasi Taman KEHATI Kajian Budaya dan Ekologi Calon Lokasi Identifikasi areal Identifikasi jenis tumbuhan lokal prioritas	Honor pelaksana Kontraktual Pertemuan Perjalanan/ Akomodasi	Kuartal I	Laporan identifikasi Taman KEHATI	Asdep Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan
2	Pelaksanaan	Sosialisasi jenis daerah dan rancangan deliniasi area Penetapan jenis daerah dan deliniasi area Penyusunan disain dasar taman KEHATI Pemetaan disain	Narasumber Pengadaan data Pertemuan Kontraktual ATK dan Bahan	Kuartal II-III	Laporan disain dasar taman KEHATI	

3	Pelaporan	Penyusunan Database KEHATI Penyusunan Draft Rencana Aksi Pengelolaan Taman KEHATI	Pertemuan Narasumber Penggandaan/ pencetakan	Kuartal III	Database KEHATI Draft Rencana Aksi Pengelolaan Taman KEHATI	
---	-----------	---	---	-------------	--	--

Sub Output : Inventarisasi data dan informasi KEHATI

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI
b Laporan Profil KEHATI

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Sosialisasi Identifikasi ketersediaan data dan informasi KEHATI Membangun Jejaring data dan informasi Penyediaan sarana dan prasarana Penyediaan SDM di daerah	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Pengadaan data	Kuartal I		Asdep Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan
2	Pelaksanaan	Membangun Kesekretariatan Membangun mekanisme data dan informasi KEHATI Workshop	Biaya petugas Sewa kendaraan Perjalanan Pertemuan Akomodasi ATK dan bahan	Kuartal II-III	Laporan inventarisasi data dan informasi KEHATI	
3	Pelaporan	Penyusunan profil KEHATI daerah Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan KEHATI daerah	Pertemuan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal III	Laporan Profil KEHATI	

Sub Output : Perubahan Tutupan Vegetasi Dalam Rangka Program Menuju Indonesia Hijau

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan perubahan tutupan vegetasi dalam rangka MIH
b Profil perubahan tutupan vegetasi Provinsi

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Koordinasi dan bimbingan teknis Penyiapan data untuk acuan verifikasi lapangan	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Pengadaan data Narasumber	Kuartal I		Asdep Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan
2	Pelaksanaan	Survey perubahan tutupan vegetasi Survey pemantauan kabupaten nominator	Biaya petugas Sewa kendaraan Perjalanan Pertemuan Akomodasi ATK dan bahan	Kuartal II-III	Data pemantauan	
3	Evaluasi dan pelaporan	Verifikasi hasil survey dan evaluasi Penyusunan laporan	Pertemuan Narasumber Penggunaan/ pencetakan	Kuartal III	Laporan perubahan tutupan vegetasi	

Sub Output : Kegiatan Penyelamatan Danau

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan kegiatan penyelamatan danau

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Pengumpulan data dan informasi Koordinasi dengan stakeholders	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Pengadaan data Narasumber	Kuartal I		Asdep Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

2	Pelaksanaan	Sosialisasi Pemantauan	Biaya petugas Sewa kendaraan	Kuartal II-III		
---	-------------	---------------------------	---------------------------------	----------------	--	--

		Bimbingan teknis kepada Kab/Kota	Perjalanan Pertemuan Akomodasi ATK dan bahan			
3	Evaluasi dan pelaporan	Penyusunan laporan	Pertemuan Narasumber Penggandaan/ pencetakan	Kuartal III	Laporan kegiatan penyelamatan danau	

Sub Output : Pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Pemilihan dan Penentuan Lokasi Pembentukan kelompok Sosialisasi	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Narasumber	Kuartal I		Asdep Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut
2	Pelaksanaan	Pelaksanaan pembibitan Pemeliharaan bibit Gerakan penanaman bersama Pemeliharaan tanaman	Biaya petugas Pembelian bibit Pembelian alat Biaya Pemeliharaan	Kuartal II-III		
3	Evaluasi dan pelaporan	Pemantauan Evaluasi dan pelaporan	Perjalanan Narasumber Pertemuan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal III	Laporan pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan laut	

Sub Output : Pengembangan inventarisasi gas rumah kaca

Hasil yang harus dilaporkan

a Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Koordinasi	Pembentukan tim pelaksana Koordinasi kegiatan di daerah Koordinasi dgn KLH	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Narasumber	Kuartal I		Asdep Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer
2	Asistensi	Workshop dasar2 pelaksanaan inventarisasi emisi GRK di daerah Workshop indentifikasi dan perhitungan potensi emisi GRK di daerah Workshop Analisis dan Pelaporan Emisi GRK di daerah	Pertemuan Narasumber Akomodasi Bahan dan ATK	Kuartal II-III		
3	Pelaporan	Penyusunan laporan Penyampaian laporan	Penggandaan/ pencetakan Pertemuan Biaya Pos	Kuartal III	Laporan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca	

Sub Output : pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Hasil yang harus dilaporkan

a Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Pembinaan dan Bintek	Pemantauan dan pengolahan data hotspot Pembuatan peta rawan kebakaran hutan dan lahan	Honor pelaksana ATK dan bahan	Kuartal I		

		Evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat Prov dan Kab/Kota	Pertemuan Narasumber			Asdep Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan
--	--	--	-----------------------------	--	--	--

2	Sosialisasi	Pembuatan dan pendistribusian bahan sosialisasi Sosialisasi dan penyuluhan langsung di tingkat desa dan kecamatan yang rawan kebakaran hutan dan lahan	Pertemuan/ Akomodasi Narasumber Perjalanan Bahan dan ATK	Kuartal II		
3	Peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA)	Identifikasi MPA Pembinaan dan Pendampingan Pemberian insentif MPA dalam patroli pencegahan dan pengawasan thd kebakaran hutan dan lahan	Penggandaan/ pencetakan Pertemuan Biaya Pos	Kuartal II		
4	Groundcheck dan investigasi serta pengawasan thd usaha/kegiatan	Identifikasi lokasi usaha atau kegiatan Penggalangan komitmen Groundcheck dan investigasi lapangan		Kuartal III	Laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	

Sub Output : Inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim

Hasil yang harus dilaporkan

- a Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim
- b Jejaring kerja data pendukung KRAPI yang disahkan dengan SK Gubernur

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Sosialisasi KRAPI Perumusan jejaring kerja di daerah dalam pelaksanaan KRAPI	Honor pelaksana ATK dan bahan	Kuartal I		Asdep Adaptasi Perubahan Iklim

		Koordinasi Pusat dan Daerah	Pertemuan Narasumber Perjalanan			
2	Pelaksanaan	Identifikasi sumber dan kualitas data yang tersedia Identifikasi sarana yang tersedia untuk akses data	Pertemuan Narasumber Akomodasi Bahan dan ATK	Kuartal II-III		
3	Pelaporan	Penyusunan laporan Penyampaian laporan	Penggandaan/ pencetakan Pertemuan	Kuartal III	Laporan inventarisasi data untuk kajian risiko dan perubahan iklim	

Sub Output : Inventarisasi upaya lokal dalam menghadapi perubahan iklim untuk mendukung pelaksanaan PROKLIM

Hasil yang harus dilaporkan

a Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Pembentukan Tim Inventarisasi Persiapan jadwal inventarisasi Penetapan lokasi kegiatan inventarisasi Pengumpulan data sekunder	Honor pelaksana Pertemuan Bahan dan ATK	Kuartal I		Asdep Adaptasi Perubahan Iklim
2	Pelaksanaan	Survey lapangan Analisa data dan informasi	Perjalanan Pertemuan Narasumber	Kuartal I-IV		

			Pengadaan data Sewa kendaraan Biaya petugas ATK dan bahan Akomodasi			
3	Evaluasi dan pendampingan KLH	Evaluasi pencapaian awal pelaksanaan identifikasi	Pertemuan/ Akomodasi Narasumber Bahan dan ATK Perjalanan	Kuartal II		
4	Pelaporan	Penyusunan laporan Penyampaian laporan	Penggandaan/ pencetakan Pertemuan Akomodasi	Kuartal III	Laporan inventarisasi upaya lokal menghadapi perubahan iklim mendukung pelaksanaan PROKLIM	

Sub Output : Identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD

Hasil yang harus dilaporkan

a Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Pembentukan Tim Inventarisasi Penentuan ruang lingkup inventarisasi Perencanaan dan penentuan lokasi Inventarisasi data sekunder	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Narasumber Perjalanan	Kuartal I		Asdep Adaptasi Perubahan Iklim
2	Pelaksanaan	Analisa data sekunder Survey lapangan	Pertemuan Narasumber	Kuartal II		

		Penyusunan laporan survey	Akomodasi Perjalanan Kontraktual Pertemuan/ Akomodasi			
3	Evaluasi dan pendampingan KLH	Evaluasi pencapaian awal pelaksanaan identifikasi				

			Narasumber Bahan dan ATK Perjalanan	Kuartal II		
4	Pelaporan	Penyusunan laporan Penyampaian laporan	Penggandaan/ pencetakan Pertemuan Akomodasi	Kuartal III	Laporan identifikasi aksi mitigasi inisiatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD	

KELUARAN (OUTPUT) PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SDA DAN LH

Indikator Kinerja Keluaran

- 1 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)
- 2 Laporan pembinaan penyusunan PDRB Hijau
- 3 Laporan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)
- 4 Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara
- 5 Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 6 Laporan sosialisasi dan pemantauan pentaatan terhadap 12 konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia
- 7 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA
- 8 Laporan pembinaan dan pengawasan inventarisasi data masyarakat hukum adat yang melaksanakan kearifan lingkungan
- 9 Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kampanye program nasional
- 10 Laporan pembinaan dan revitalisasi peran penerima anugerah Kalpataru
- 11 Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah
- 12 Laporan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH

Sub Output : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)

Hasil yang harus dilaporkan

a

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan RKL-RPL di daerah	Persiapan Pelaksanaan Pasca pelaksanaan	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan Honor narasumber Sewa kendaraan Pengiriman surat	Kuartal I		Asdep Kajian Dampak Lingkungan

			Penggandaan/ pencetakan			
2	Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Daerah	Persiapan Pelaksanaan Pasca pelaksanaan	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan Honor narasumber Sewa kendaraan Pengiriman surat Penggandaan/ pencetakan	Kuartal II-III		
3	Evaluasi Mutu Dokumen AMDAL	Persiapan Pelaksanaan Pasca pelaksanaan	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan Honor narasumber Sewa kendaraan Pengiriman surat Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan di daerah (pemantauan terhadap RKL /RPL, pengawasan komisi penilai Amdal, dan evaluasi mutu dokumen)	
Sub Output : pembinaan penyusunan PDRB Hijau						
Hasil yang harus dilaporkan a Laporan pembinaan penyusunan PDRB Hijau						
	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina

1	Persiapan	Persiapan Awal Pelaksanaan Bintek a. Pembentukan Tim Pelaksana b. Pembentukan Tim Pemantau c. Penyusunan jadwal kegiatan, penentuan narasumber dan lokasi survei, penyiapan materi tes pra dan post bintek	Honor pelaksana Pertemuan Bahan dan ATK Narasumber	Kuartal I	Proposal Bintek	Asdep Ekonomi Lingkungan
		Koordinasi pelaksanaan a. Koordinasi dgn dinas terkait b. Koordinasi dgn pemda lokasi survei c. Koordinasi dgn narasumber d. Koordinasi dgn pengelola lokasi pelatihan/workshop Survei pendahuluan a. Pertemuan persiapan tim survei b. Pelaksanaan survey lapangan c. Penyusunan notulen survei				
2	Pelaksanaan Bimtek	Workshop Survey lapangan Asistensi dan penyempurnaan penyusunan PDRB hijau	Perjalanan Pertemuan Narasumber ATK dan bahan Jasa evaluasi	Kuartal II		
3	Asistensi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Evaluasi	Pertemuan Narasumber ATK dan Bahan	Kuartal III		
4	Pelaporan	Persiapan pelaporan (pengumpulan data hasil evaluasi) Penyusunan laporan	Pertemuan Narasumber	Kuartal IV	Laporan pembinaan penyusunan PDRB Hijau	

		Pengiriman laporan	ATK dan Bahan Penggandaan/ pencetakan			
Sub Output : Inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)						
Hasil yang harus dilaporkan a Laporan Inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)						
	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Inventarisasi	Pencatatan pengaduan Klarifikasi Briefing petugas	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan	Kuartal I		Asdep Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan
2	Verifikasi	Penyiapan Bahan Verifikasi Lapangan Rekomendasi Evaluasi	Honor narasumber Pertemuan ATK dan bahan Analisa Lab Perjalanan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal II-III		
3	Peningkatan Kapasitas	Sosialisasi	Pertemuan Narasumber Bahan/ATK Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan Inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup (khususnya pelanggaran delik formil tertentu)	
Sub Output : inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara						

Hasil yang harus dilaporkan						
a Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara						
	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Koordinasi	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Penggandaan	Kuartal I		Asdep Penyelesaian Sengketa Lingkungan
2	Pelaksanaan	Inventarisasi Klarifikasi Lapangan	Honor narasumber Pertemuan Sewa Kendaraan Analisa Lab Perjalanan Penggandaan	Kuartal II-III		
3	Pelaporan	Penyusunan Laporan	Pertemuan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan inventarisasi dan klarifikasi sengketa lingkungan hidup yang berpotensi atau/telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai hak milik privat dan/atau lingkungan hidup sebagai hak milik publik/negara	
Sub Output : inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						

Hasil yang harus dilaporkan

a Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Inventarisasi	Koordinasi Rekapitulasi dugaan kasus	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Penggandaan	Kuartal I		Asdep Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
2	Klarifikasi	Klarifikasi	Honor narasumber Pertemuan Sewa Kendaraan Analisa Lab Perjalanan Penggandaan	Kuartal II-III		
3	Pelaporan	Penyusunan Laporan	Pertemuan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan inventarisasi dan klarifikasi dugaan tindak pidana (delik formil maupun delik materiil) akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	

Sub Output : sosialisasi dan pemantauan penataan terhadap 12 konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia

Hasil yang harus dilaporkan

a Laporan sosialisasi dan pemantauan penataan terhadap 12 konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Koordinasi Pembentukan Tim Verifikasi	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan	Kuartal I		Asdep Penataan Hukum Lingkungan

			Penggandaan			Internasional
--	--	--	-------------	--	--	---------------

2	Pelaksanaan	Identifikasi potensi dan verifikasi kasus lingkungan lintas batas - Pengambilan sample - Analisa Iboratorium Sosialisasi	Honor narasumber Pertemuan Sewa Kendaraan Analisa Lab Perjalanan Penggandaan	Kuartal II		
3	Pelaporan	Penyusunan Laporan	Pertemuan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal III		
4	Pemantauan	Pemantauan Lapangan	Pertemuan Pengiriman surat/fax Narasumber Penggandaan	Kuartal IV	Laporan sosialisasi dan pemantauan penataan terhadap 12 konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia	

Sub Output : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Koordinasi dengan Kab/Kota	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan	Kuartal I		Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat

			Honor narasumber			
--	--	--	------------------	--	--	--

2	Pelaksanaan	Sosialisasi Program ke Kab/Kota Bimbingan teknis ke Kab/Kota dalam rangka pembinaan sekolah Membuat pilot project untuk 4 satuan sekolah yang berbeda (SD, SMP, SMA, SMK) Menilai dan menetapkan sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi	Honor narasumber Pertemuan Perjalanan ATK dan Bahan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal II-III		
3	Evaluasi dan pelaporan	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ke tingkat Pusat	Pertemuan Narasumber Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADIWIYATA	

Sub Output : Pembinaan dan pengawasan inventarisasi data masyarakat hukum adat yang melaksanakan kearifan lingkungan

Hasil yang harus dilaporkan

a Laporan pembinaan dan pengawasan inventarisasi data masyarakat hukum adat yang melaksanakan kearifan lingkungan

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Identifikasi Masy. Hukum adat Identifikasi kearifan lingkungan yang ada Pertemuan koordinasi dgn daerah	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan Honor narasumber	Kuartal I		Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat
2	Pelaksanaan	Inventarisasi (basis data) Verifikasi data di lapangan	Honor narasumber Perjalanan Pertemuan	Kuartal II-III		

3	Evaluasi dan pelaporan	Penyusunan laporan	Pertemuan		Laporan pembinaan dan pengawasan inventarisasi data masyarakat hukum
---	------------------------	--------------------	-----------	--	--

			Narasumber Bahan dan ATK Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	
--	--	--	---	------------	--

Sub Output : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kampanye program nasional

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kampanye program nasional
b Rencana tindak kampanye dan publikasi lingkungan terkait dengan isu lokal

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Penyusunan Materi	Penentuan isu lokal Identifikasi capaian kinerja Provinsi dalam penyelesaian isu kearifan lokal 2012 dan target 2013 (result based approach) Penentuan perubahan perilaku Identifikasi stakeholder Identifikasi khalayak sasaran Perumusan pesan Penentuan Media	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan Honor narasumber	Kuartal I-II	Rencana tindak kampanye dan publikasi lingkungan terkait dengan isu lokal	Asdep Komunikasi Lingkungan
2	Pelaksanaan	Kampanye dan publikasi isu lokal	Paket kampanye	Kuartal III		
3	Evaluasi dan pelaporan	Penyusunan laporan	Pertemuan		Laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan	

			Narasumber Bahan dan ATK	Kuartal IV	kampanye program	
--	--	--	-----------------------------	------------	------------------	--

			Penggandaan/ pencetakan			
--	--	--	----------------------------	--	--	--

Sub Output : Pembinaan dan revitalisasi peran penerima anugerah Kalpataru

Hasil yang harus dilaporkan
a Laporan pembinaan dan revitalisasi peran penerima anugerah Kalpataru

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Pembinaan	Sinkronisasi/Koordinasi perencanaan Penyebarluasan informasi melalui berbagai media Sosialisasi Identifikasi dan pembinaan calon Kalpataru Pengumpulan data calon Pengusulan calon Penyusunan laporan	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan Narasumber Perjalanan Pengiriman surat Penggandaan/ Pencetakan	Kuartal I-II		Asdep Peningkatan Peran Masyarakat
2	Revitalisasi peran penerima anugerah Kalpataru	Baseline Study: penentuan target grup, isu lingkungan dan lokasi kegiatan Koordinasi dengan para pihak Pembekalan tematik Kegiatan out-door monitoring dan evaluasi Penyusunan laporan	Pertemuan Narasumber ATK dan bahan Penggandaan	Kuartal III-IV	Laporan pembinaan dan revitalisasi peran penerima anugerah Kalpataru	

Sub Output : Peningkatan Kapasitas SDM Keb/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah

Sub Output : Peningkatan kapasitas SDM kab/kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah

Hasil yang harus dilaporkan

a Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Klasifikasi/pemetaan kompetensi laboratorium penerima DAK LH	Honor pelaksana ATK dan bahan Pertemuan	Kuartal I		Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal)
2	Pelaksanaan	Penyusunan materi Penetapan peserta/pengajar/narasumber dan instruktur Bimtek Pemanfaatan Laboratorium DAK-LH	Pertemuan Honor pengajar/narasumber dan instruktur ATK dan bahan Penggandaan	Kuartal II-III		
3	Pelaporan	Penyusunan laporan	Pertemuan ATK dan Bahan Penggandaan/ Pencetakan	Kuartal IV	Laporan peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota dalam rangka optimalisasi laboratorium lingkungan hidup daerah	

Sub Output : Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH

Hasil yang harus dilaporkan

a Laporan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH

	Komponen kegiatan	Tahapan pelaksanaan	Komponen belanja	Waktu pelaksanaan (Kuartalan)	Hasil yang dilaporkan	Unit Eselon II pembina
1	Persiapan	Inventarisasi lokasi pemantauan	Honor pelaksana			Kepala Biro

		Koordinasi dengan daerah Kab/Kota penerima DAK LH	ATK dan bahan Pertemuan Perjalanan Honor narasumber	Kuartal I		Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
2	Pelaksanaan	Pemantauan lapangan Kompilasi data hasil pemantauan	Sewa kendaraan Uang harian Penginapan Pertemuan	Kuartal II-III		
3	Evaluasi dan pelaporan	Pertemuan evaluasi dengan KLH Penyusunan laporan	Pertemuan Narasumber ATK dan bahan Perjalanan Penggandaan/ pencetakan	Kuartal IV	Laporan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang LH	

B. PELAPORAN KEGIATAN

Laporan teknis harus memuat: a) kumpulan data dan informasi yang wajib dikumpulkan; b) hasil analisis terhadap data dan informasi tersebut, serta intisari dari seluruh rangkaian proses pelaksanaannya. Rincian lebih lanjut ditetapkan oleh Eselon I KLH terkait.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

Balthasar Kambuaya

